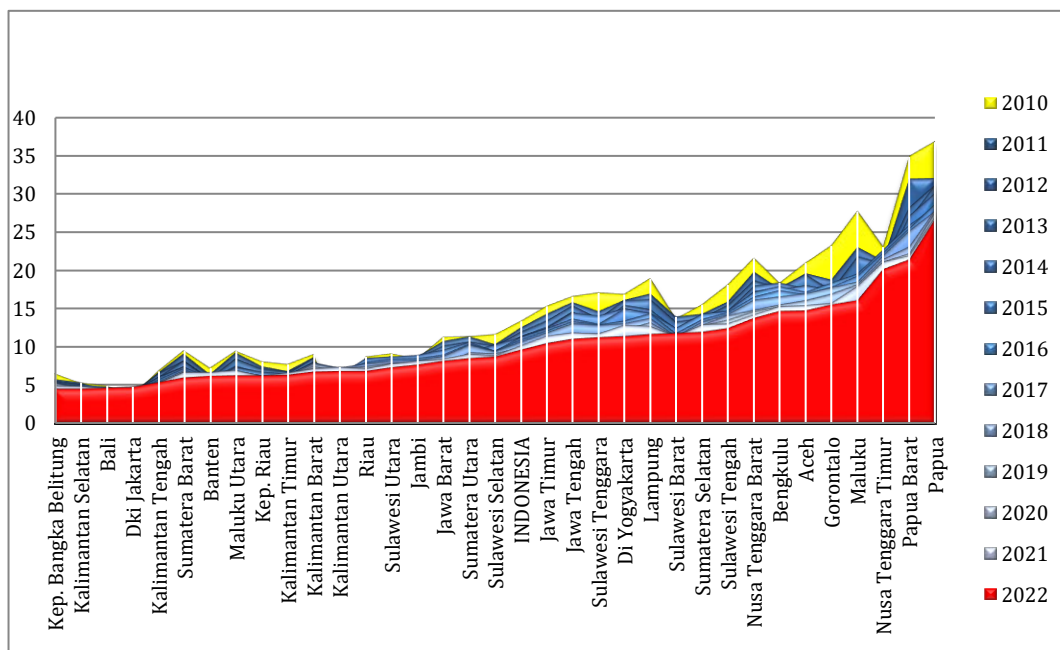


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang meresahkan banyak negara dan menjadi tantangan pembangunan yang terus diperangi dengan berbagai strategi kebijakan pemerintah. Data menunjukkan bahwa penduduk miskin di Indonesia berfluktuasi dimana persentase penduduk miskin secara nasional di tahun 2010 sebesar 13.33 persen, kemudian menurun hingga 9.41 persen pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 kembali menanjak menjadi 9.78 persen, hingga tahun 2021 mencapai 10.14 persen dan kemudian menurun kembali pada tahun 2022 menjadi 9.54 persen.



lan Pusat Statistik

bar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin di Indonesia tahun 2010-2022



Gambar 1.1 menampilkan persentase penduduk miskin pada provinsi-provinsi di Indonesia dimana terdapat 16 provinsi yang berada di atas rata penduduk miskin Indonesia dan 18 provinsi berada dibawah rata-rata persentase penduduk miskin Indonesia. Pada tahun 2022 di wilayah timur terdapat 9 provinsi termiskin, dari rata-rata persentase penduduk miskin tersebut wilayah Papua menjadi provinsi tertinggi kemiskinan dimana persentase penduduk miskin Provinsi Papua adalah 26,56 persen dan Papua Barat sebesar 21,33 persen. Selanjutnya Nusa Tenggara yakni Nusa Tenggara Timur 20,05 persen berada urutan ketiga kemiskinan sedangkan Nusa Tenggara Barat berada di urutan kedelapan dengan persentase kemiskinan 13,68%

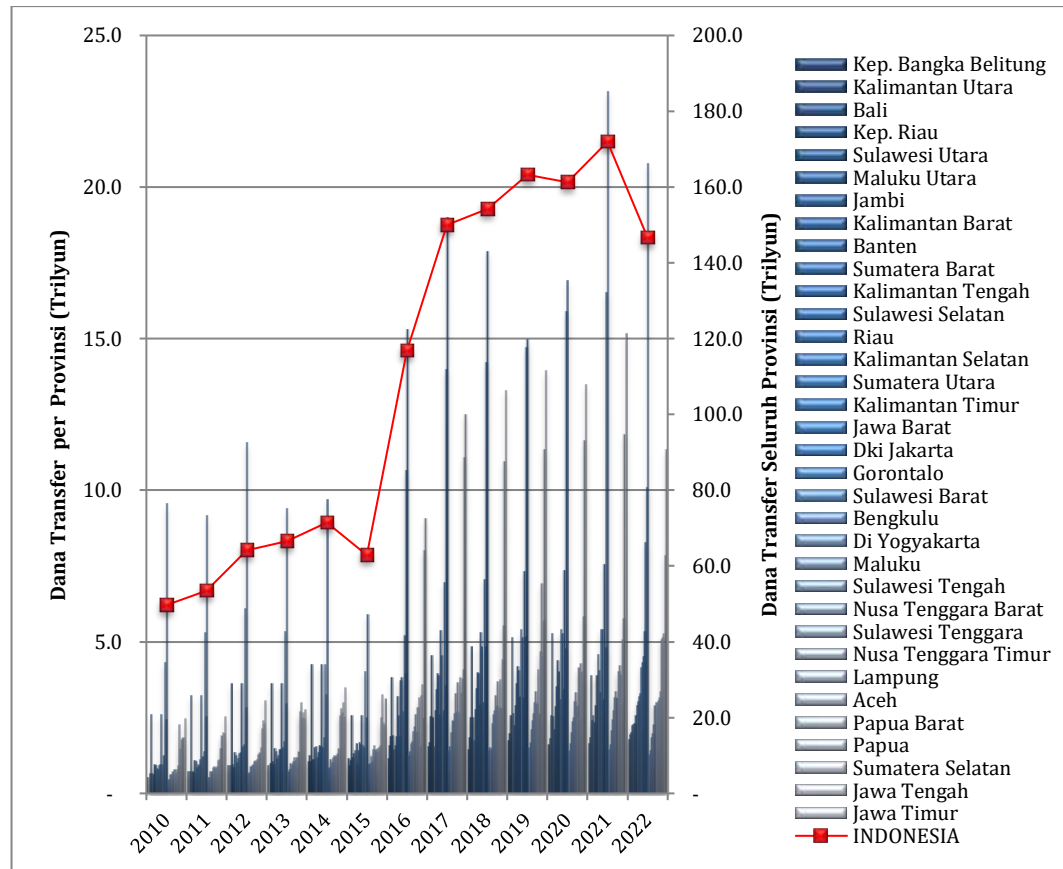
Urutan keempat kemiskinan tertinggi adalah Maluku yakni 15,97%. Untuk wilayah Sulawesi terdapat 4 provinsi (Gorontalo 15,42%; Sulawesi Tengah 12,33%; Sulawesi Barat 11,75 dan Sulawesi Tenggara 11,17). Wilayah Barat terdapat 7 provinsi yakni Pulau Sumatera terdapat 4 provinsi (Aceh 14,64; Bengkulu 14,62; Sumatera Selatan 11,9% dan Lampung 11,57), dan Pulau Jawa terdapat 3 provinsi (DI Yogyakarta 11,34; Jawa Tengah 10,93% dan Jawa timur 10,38%).

Kemiskinan menciptakan kondisi ketidakberdayaan individu yang pada akhirnya akan berdampak pada pembangunan. Permasalahan kemiskinan ini membutuhkan intervensi pemerintah. Pengeluaran pemerintah terkhusus kebijakan desentralisasi fiskal dipandang menjadi solusi yang dapat mereduksi persoalan pembangunan tersebut (Mankiw, 2006; Oates, 1972; Samuelson & Nordhaus, 2009).

Pemerintah terkait kebijakan tersebut mengucurkan sejumlah dana ke ntuk dikelola. Gambar 1.2 menunjukan bahwa meskipun kucuran dana erfluktuasi namun terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun



2010. Kucuran dana tersebut proporsional berdasarkan kondisi masing-masing wilayah, namun pada akhirnya tidak mencapai kesejahteraan yang merata. Kebijakan yang diharapkan memberi perubahan tersebut, tidak selalu berjalan sesuai yang diharapkan. Kebijakan fiskal tidak menjadi jaminan mutlak dan dapat saja menimbulkan inefisiensi (Boyne, 1998; Sen, 1999).



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 2 Dana transfer Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2022

Berbagai kajian empiris dilakukan untuk melihat dampak pengeluaran pemerintah tersebut, dan tidak hanya dari sisi pendapatan tetapi belanja serta proporsi belanjanya (derajat desentralisasi fiskal). Ada temuan yang menyetujui bahwa pengeluaran pemerintah tersebut berperan mengurangi kemiskinan

m *et al.*, 2024; Gomo, 2019; Lu *et al.*, 2021; Pratama *et al.*, 2019; e, 2018), namun temuan lainnya mengatakan bahwa dana tersebut justru



memperparah kemiskinan (Hafizhah *et al.*, 2022), dan temuan lainnya mengungkapkan bahwa dana tersebut tidak memberi efek apapun terhadap kemiskinan (Cadena *et al.*, 2023; Febrianti *et al.*, 2022; Maharajabdinul *et al.*, 2015). Belanja daerah juga dipandang berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, hal ini diungkapkan dalam temuan (Ajisafe *et al.*, 2024; Mustamin *et al.*, 2015; Mutamainnah *et al.*, 2022) dan temuan lainnya mengatakan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Fitriyanti & Handayani, 2021; Krismajaya & Dewi, 2019; Setena, 2024; Vitara Agatha & Uliansyah, 2021). Temuan yang mengungkapkan bahwa belanja tersebut akan berdampak negatif terhadap kemiskinan pada tahun pertama dan positif setelah tahun berikutnya (Usmanova, 2023).

Derajat desentralisasi fiskal (DDF) dalam beberapa temuan, dikatakan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan (Ali & Saleh, 2020; Aulia, 2014; Sudewi & Wirathi, 2013; Wijaya, 2019; Zahari *et al.*, 2018). Ada pula temuan yang mengungkapkan bahwa DDF tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Purnomo *et al.*, 2020; Situmorang *et al.*, 2023; Widyastuti & Nusantara, 2022), dan temuan lain mengungkapkan bahwa pada wilayah barat berpengaruh negatif tetapi untuk wilayah timur tidak berpengaruh (Wibowo & Oktivalerina, 2022). Pandangan-pandangan dan perbedaan temuan empiris yang berbeda tersebut mengisyaratkan bahwa faktor lain perlu dipertimbangkan. Pendidikan menjadi determinan lain kemiskinan (Barro, 2008; Brady, 2019). Temuan empiris juga menyetujui pendidikan berdampak negatif terhadap kemiskinan (Bintang & Woyanti, 2018; Dewi, 2021; Finkayana & Dewi, 2016; Hofmarcher, 2021; Izzati & Indrawati, 2021; Litschig & Morrison, 2013; Purnomo *et al.*, 2020; Rauch *et al.*,

Ami & Masjkuri, 2018; Yanthi & Wenagama, 2022). Namun temuan empiris menyatakan bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan



(Harman *et al.*, 2022; Wandita & Fithriani, 2021), dan temuan lainnya dikatakan bahwa pada kondisi tertentu pendidikan justru memperparah kemiskinan (Zhang, 2014). Temuan empiris lainnya menyatakan bahwa pendidikan hanya akan berdampak pada jangka panjang (Samuel, 2021), dan temuan lain mengatakan bahwa hanya peningkatan pendidikan tinggi yang mampu menciptakan kemiskinan yang rendah (Barbosa *et al.*, 2020).

Investasi swasta merupakan faktor lain yang berperan menekan kemiskinan. Hal ini dikarenakan wilayah miskin pada umumnya dalam siklus investasi swasta rendah, modal rendah, produktivitas rendah, serta pendapatan dan permintaan rendah, yang terbentuk menjadi lingkaran setan kemiskinan (Nurkse, 1956). Investasi baik publik dan swasta terutama pada infrastruktur dasar serta berkelanjutan berperan penting dalam menekan kemiskinan (Brady, 2019; Haughton & Khandker, 2009; Sachs, 1972).

Peran penting investasi swasta tersebut disetujui oleh sejumlah temuan yang menyatakan bahwa investasi swasta berpengaruh menekan kemiskinan (Anetor *et al.*, 2020; Giscka *et al.*, 2022; Soegoto *et al.*, 2022), namun temuan lain mengatakan bahwa dampak negatif hanya pada negara Afrika Sub-Sahara (Aloui *et al.*, 2024) sedangkan pada 15 negara anggota *ECOWAS* (*Economic Community of West African States*) berpengaruh positif. Hubungan positif tersebut searah dengan temuan (Marini, 2016). Pada temuan lainnya dikatakan bahwa Investasi swasta tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Kartini *et al.*, 2019; R. Pratama, Kindangen, *et al.*, 2019; Semara *et al.*, 2021; Supratyoningsih & Yuliarmi, 2022).

Selain dari hubungan langsung pengeluaran pemerintah, pendidikan dan swasta terhadap kemiskinan tersebut maka terdapat pandangan bahwa an, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan menjadi



rangkaian yang tak terpisahkan. Arah pertumbuhan ekonomi yang salah akan memperlebar ketimpangan dan memperparah kemiskinan (Samuelson & Nordhaus, 2009; Todaro & Robbins, 2011).

Kemiskinan menciptakan ketidakberdayaan sehingga dibutuhkan bantuan yang merangsang pendapatan dan pertumbuhan ekonomi (Chambers, 1983). Ketimpangan tidak dapat diabaikan karena kemajuan suatu wilayah akan diikuti oleh ketimpangan (Atkinson, 2015). Berbagai kajian empiris pun mulai menyoroti pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi swasta dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan serta pengaruh pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Fattah *et al.*, 2022; Gisca *et al.*, 2022; Pratama *et al.*, 2019; Sabir *et al.*, 2015; Syakur *et al.*, 2022). Pendidikan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Izzati & Indrawati, 2021). Investasi swasta berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Pratama *et al.*, 2019). Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan (Usmanova, 2023; Yusnafira *et al.*, 2023).

Pengeluaran pemerintah berdampak negatif terhadap ketimpangan pendapatan (Fattah *et al.*, 2022; Gomo, 2019; Rauch *et al.*, 2022), Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Pendidikan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan (Medeiros *et al.*, 2020; Situngkir & Syafri, 2020). Ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap kemiskinan (Hafizhah *et al.*, 2022). Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan (Anwar & Mangilep, 2019). Investasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan secara tidak langsung melalui

ihan ekonomi (Adipuryanti & Sudibia, 2015).

ian empiris lainnya tidak hanya melihat hubungan langsung, melainkan



pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan menjadi variabel intervening untuk melihat pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah, pendidikan dan investasi terhadap kemiskinan. Temuan empiris menemukan bahwa pengeluaran pemerintah akan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan jika melalui pertumbuhan ekonomi (Vitara Agatha & Uliansyah, 2021). Demikian pula belanja daerah dan Investasi (Krismajaya & Dewi, 2019).

Temuan lain mengungkapkan bahwa Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi (Maharajabdinul *et al.*, 2015; Mustamin *et al.*, 2015; Mutamainnah *et al.*, 2022; R. Pratama, Kindangen, 2019). Investasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi (Paddu, 2023). Demikian pula pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan jika melalui ketimpangan pendapatan (Agussalim *et al.*, 2024).

Ulasan-ulasan ini mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah, investasi swasta dan pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan dimana model yang dikemukakan dalam berbagai kajian empiris tersebut adalah: 1). Melihat hubungan langsung pengeluaran pemerintah, investasi swasta, pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan; 2). Melihat hubungan langsung pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan; 3). Melihat hubungan tidak langsung pengeluaran pemerintah, Investasi, dan pendidikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi; 4). Melihat hubungan tidak langsung pengeluaran pemerintah, investasi, dan pendidikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.



nun belum ada model yang melihat pengaruh pengeluaran pemerintah, dan pendidikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan

ketimpangan pendapatan. Sehingga penelitian ini menawarkan 1). Pengaruh langsung terhadap kemiskinan; 2). Pengaruh tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi; 3). Pengaruh tidak langsung terhadap kemiskinan melalui ketimpangan pendapatan dan 4). Pengaruh tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Selain dari model yang ditawarkan tersebut maka penelitian ini juga menawarkan tempat penelitian yang lebih spesifik yakni hanya menyoroti provinsi-provinsi dengan persentase penduduk miskin diatas rata-rata persentase penduduk nasional dimana rata-rata penelitian selain semua provinsi di Indonesia maka penelitian menyoroti antar pulau, antar kawasan yakni timur atau barat atau berfokus pada provinsi atau kabupaten tertentu.

Kebaruan model dan lokus ini dipandang sebagai sebuah urgensi karena hasil penelitian ini akan sangat representatif untuk mengkaji stagnasi kemiskinan di provinsi-provinsi tersebut. Dengan demikian maka penelitian dengan judul Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan Di Indonesia difokuskan pada 16 provinsi dengan persentase penduduk miskin diatas rata-rata persentase penduduk miskin nasional, dimana 2 variabel desentralisasi fiskal dan 2 variabel kontrol menjadi variabel eksogen.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.



2. Apakah derajat desentralisasi fiskal daerah berpengaruh terhadap

Kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.

3. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.
4. Apakah investasi swasta berpengaruh terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu dari latar belakangnya dan rumusan masalah yang dikemukakan maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis :

1. Pengaruh belanja daerah terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.
2. Pengaruh derajat desentralisasi fiskal daerah terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.
3. Pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan
4. Pengaruh investasi swasta terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.



1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dari sisi desentralisasi fiskal, pendidikan dan investasi swasta dalam keterkaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan penurunan tingkat kemiskinan, terutama pada wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, sehingga memperkaya referensi terkait permasalahan kemiskinan. Secara praktis akan berkontribusi bagi akademisi dalam penelitian ilmiah, sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengeluaran publik serta meningkatkan kapasitas fiskal daerahnya. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam pembuatan berbagai kebijakan pembangunan terutama dalam upaya menekan kemiskinan di 16 provinsi yang diteliti.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Berdasarkan fenomena kemiskinan di wilayah 16 provinsi yang telah dikemukakan maka penelitian ini terbatas pada provinsi-provinsi di wilayah tersebut, yakni Papua, Papua Barat, NTT, NTB, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Aceh, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan mengingat luas wilayah serta keterbatasan peneliti maka penelitian terbatas pada data-data sekunder yang dapat diakses dengan internet.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan menjadi permasalahan pembangunan yang dalam berbagai kebijakan diharapkan dapat direduksi. OECD mengemukakan bahwa kemiskinan dipandang dari dua sisi yakni : 1). *Income poverty* yang mengacu pada kondisi di mana individu atau keluarga tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Biasanya, ini diukur dengan membandingkan pendapatan individu atau keluarga dengan ambang batas kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga internasional; 2). *No income poverty* merujuk pada situasi di mana individu atau keluarga tidak memiliki sumber pendapatan tetap, baik dari pekerjaan, usaha, maupun transfer sosial. Hal ini dapat disebabkan oleh pengangguran, ketidakmampuan bekerja, atau ketergantungan sepenuhnya pada bantuan sosial.

Dalam artikel kemiskinan makro dan kemiskinan mikro rilis kementerian keuangan, dikemukakan bahwa dalam mengukur kemiskinan di Indonesia ada dua jenis data yang digunakan yakni : 1) Kemiskinan makro yang mengukur kemiskinan dengan konsep *basic needs approach* dan pendekatan moneter dimana angka kemiskinan didasarkan pada garis kemiskinan makanan yakni 2100 kilokalori per kapita per hari ditambah dengan non makanan, dan sumber data yang digunakan



senas (sampel) sehingga data bersifat estimasi dan diperuntukan
an dan evaluasi dengan target geografis tanpa menunjuk siapa dan

dimana alamatnya; 2) Kemiskinan mikro yang merujuk pada konsep multidimensi dan pendekatan non moneter yang penetapan angka kemiskinannya berdasarkan indeks atau *Proxy Means Test* (PMT) yaitu perkiraan pengeluaran rumah tangga dengan melihat aspek sosial ekonomi. Data yang dihasilkan lebih spesifik dan merujuk pada individu dan target rumah tangga tertentu secara langsung sehingga diperuntukan sebagai dasar penetapan berbagai bantuan dan perlindungan sosial seperti BLT, PKH, KIP, raskin, jaminan Kesehatan dan lain-lain sejenisnya. (Kementerian Keuangan, 2023)

Badan Pusat Statistik mengukur kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kebutuhan dasar (*cost of basic needs*) dimana jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut dinyatakan dalam garis kemiskinan. Garis kemiskinan didasarkan pada pengeluaran minimum untuk kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan. Komponen makanan mengacu pada standar konsumsi minimal 2.100 kilokalori per kapita per hari yang berasal dari komponen umum sesuai pola konsumsi rumah tangga Indonesia (beras dll). Komponen non-makanan mencakup kebutuhan minimum untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi.

Data dihitung berdasarkan survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan setahun 2 kali. Sehingga Garis kemiskinan tersebut mencerminkan kebutuhan riil penduduk Indonesia. Konsep kemiskinan tersebut kemudian diterjemahkan sebagai pendapatan per orang yang dapat diartikan sebagai gaji 20.000/hari bukan orang miskin. Selanjutnya di kemukakan bahwa konsep kemiskinan ini bukan sebuah asumsi bahwa masyarakat yang berada diatas garis kemiskinan



kan sebagai masyarakat yang sejahtera atau kaya karena setelah a garis kemiskinan maka diatasnya terdapat kelompok rentan ok menengah dan kelompok atas (Badan Pusat Statistik, 2025).

Konsep kemiskinan tersebut kemudian mengiring pada pandangan bahwa permasalahan kemiskinan adalah permasalahan pendapatan sehingga permasalahannya adalah bagaimana menumbuhkan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan bagaikan rangkaian yang tak terpisahkan. Pembangunan menghendaki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan namun permasalahannya bukan hanya pada bagaimana menumbuhkan ekonomi tetapi siapa yang menumbuhkan ekonomi dan berapa banyak yang menumbuhkannya, jika peningkatan hanya dilakukan oleh segelintir orang dan hasilnya menguntungkan segelintir orang tersebut maka pertumbuhan ekonomi akan memperlebar ketimpangan dan memperburuk kemiskinan (Todaro & Smith, 2011).

Lebih lanjut Todaro dan Smith merumuskan kesejahteraan untuk menggambarkan hubungan antara kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan yakni $W = W(Y, I, P)$ dimana W adalah kesejahteraan, Y adalah pendapatan per kapita dan berhubungan positif dengan kesejahteraan, I adalah ketimpangan yang memiliki hubungan negatif dan kemiskinan yang juga berhubungan negatif dengan kemiskinan yang kemudian tiga kasus pembangunan dualistik dianalisis untuk melihat hubungan tersebut dalam 3 tipologi pertumbuhan (perluasan sektor modern, pengayaan sektor modern dan pengayaan sektor tradisional

Tipologi pertumbuhan perluasan sektor modern dimana perekonomian dua sektor berkembang dengan memperluas ukuran sektor modern sambil mempertahankan tingkat upah sektor konstan di kedua sektor itu, hasil analisisnya



kondisi ini pendapatan absolut meningkat dan kemiskinan absolut un kondisi ini relatif dimana dapat saja membaik atau sebaliknya mun dalam kenyataan pada kasus tipologi ini maka ketimpangan

akan memburuk di awal-awal pembangunan dan kemudian membaik.

Tipologi pertumbuhan pengayaan sektor modern, yakni adanya pertumbuhan ekonomi namun terbatas pada sekelompok orang dalam jumlah yang tetap di sektor modern, sedangkan jumlah tenaga kerja dan tingkat upah tetap konstan di sektor tradisional. Pada kasus ini pertumbuhan akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dengan distribusi pendapatan yang rendah, serta tidak ada perubahan dalam tingkat kemiskinan, pertumbuhan dengan memperkaya sektor modern menyebabkan pendapatan yang semakin menjauh dari pemerataan

Tipologi pertumbuhan pengayaan sektor tradisional merupakan keadaan yang menunjukkan manfaat pertumbuhan ekonomi yang terbagi secara merata kepada semua pekerja sektor tradisional tanpa ada atau sedikit pertumbuhan pada sektor modern. Pada tipologi ini pertumbuhan akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan distribusi pendapatan yang relatif lebih merata serta kemiskinan yang rendah. Pertumbuhan dengan memperkaya sektor tradisional mendorong pendapatan mendekati pemerataan.

Samuelson & Nordhaus (2009) mengatakan ketidakmerataan akan meningkat sejalan dengan kemajuan ekonomi dan setelahnya akan ada penurunan ketidakmerataan, dan ketimpangan ekstrem yakni sebagian orang hidup mewah sementara lainnya sangat miskin terjadi pada negara-negara berpendapatan menengah, dan meskipun pendapatan dari hak milik (properti) di distribusi secara merata tidak akan berdampak, sehingga perlu di telaah berbagai faktor yang mempengaruhi pendapatan diantaranya perbedaan pekerjaan dan



pekerjaan serta perbedaan tingkat pendidikan. Lebih lanjut mereka menuliskan dua pendapat besar yang berkembang dalam kalangan ilmuwan. Pandangan pertama adalah pemerintah bertanggung jawab

menghapus kemiskinan, baik dengan cara memberi pendapatan secara langsung kepada orang miskin atau dengan mengoreksi kondisi yang menyebabkan kemiskinan tersebut, pandangan kedua bahwa kemiskinan tumbuh dari tingkah laku perorangan yang tidak adaptif, dan hanya dapat diperbaiki oleh orang miskin itu sendiri, pandangan ini juga menyalahkan pemerintah karena keberadaan program pemerintah memupuk ketergantungan dan mematikan inisiatif seseorang untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki sehingga pemerintah sebaliknya mengurangi program kesejahteraan. Kedua pandangan ini dan implikasinya difaktorkan ke dalam persamaan politik,

Cheyne *et al* (1998) mengemukakan agar memahami kemiskinan, ada dua paradigma atau teori besar, yakni paradigma Neo-liberal dan Sosial Demokrat yang perlu ditelaah. Teori Neo-liberal berpendapat bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu yang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan atau pilihan-pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang apabila kekuatan-kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Oleh sebab itu, strategi penanggulangan kemiskinan harus bersifat residual, sementara, dan hanya melibatkan keluarga, kelompok-kelompok swadaya atau lembaga-lembaga keagamaan. Sementara itu, negara hanya berperan sebagai penjaga malam dan baru dapat melakukan campur tangan apabila lembaga-lembaga tersebut tidak mampu menjalankan tugasnya. Teori Neo-Liberal yakin bahwa berkat keunggulan mekanisme pasar dan pertumbuhan ekonomi secara alamiah akan mampu mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan sosial.



Sosial Demokrat berpendapat bahwa kemiskinan bukan merupakan persoalan individual, melainkan merupakan persoalan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat

tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber- sumber kemasyarakatan. Para pendukung Sosial-Demokrat berpendapat bahwa kesetaraan merupakan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian kebebasan. Terwujudnya kebebasan hanya dapat dicapai apabila setiap orang memiliki atau mampu menjangkau sumber-sumber, misalnya pendidikan dan kesehatan yang baik serta pendapatan yang cukup. Negara mempunyai peranan penting dalam menjamin setiap orang dapat berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat yang memungkinkan mereka menentukan pilihan-pilihannya dalam memenuhi kebutuhannya.

Perbedaan pandangan Neo-liberal dengan Sosial-Demokrat terletak pada beberapa poin berikut : (1) Neoliberal memandang bahwa kemiskinan adalah individual, dimana indikator yang dilihat adalah kemiskinan absolut sedangkan Sosial-demokrat memandang hal tersebut adalah struktural dengan indikator kemiskinan relatif; (2) Menurut Neoliberal penyebab kemiskinan adalah kelemahan dan pilihan individu yakni lemahnya pengaturan pendapatan dan kepribadian yang lemah, sebaliknya Sosial-demokrat berpendapat kemiskinan merupakan ketimpangan struktur ekonomi, politik dan ketidakadilan sosial; (3) Neoliberal menyarankan penyaluran pendapatan terhadap orang miskin secara selektif, memberi pelatihan keterampilan pengelolaan keuangan sedangkan sosial-demokrat mengemukakan penyaluran pendapatan dasar secara universal. Perubahan fundamental dalam pola-pola pendistribusian pendapatan melalui intervensi negara sebagai strategi penanggulangan kemiskinan.



Disisi lain berkembang pandangan bahwa semua jenis subsidi harus an intervensi pemerintah seharusnya hanya ditujukan untuk igan memfasilitasi perubahan Mudge, (2008), pandangan tersebut Chambers dikarenakan kemiskinan merupakan konsep terpadu

yang terdiri dari lima dimensi: kemiskinan, ketidakberdayaan, kerentanan terhadap keadaan darurat, ketergantungan, dan keterasingan, yang berakibat pada ketidakmampuan untuk menciptakan solusi sehingga bantuan orang lain sangat dibutuhkan, terutama untuk meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi (Chambers, 1983). Pendapat tersebut disetujui oleh Haughton dan Khandker dengan pandangan bahwa kondisi yang buruk mendorong kemiskinan, dan kondisi buruk tersebut baik dari segi pemenuhan kebutuhan dasar dan karakter individu, maupun pendidikan yang tidak memadai (Haughton & Khandker, 2009).

Teori individualistik berpandangan bahwa karakteristik individu dan pilihannya terkait perilakunya yang kurang termotivasi, sikapnya yang tidak mengembangkan kemampuan, keputusan-keputusannya yang tidak tepat terutama dalam pengelolaan keuangannya dapat menjadi penyebab kemiskinan, selain faktor internal ini maka disadari bahwa ada pula faktor eksternal yang berperan sehingga Teori struktural mengemukakan bahwa kemiskinan dikarenakan adanya ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dan sistem ekonomi, diskriminasi, dan kebijakan pemerintah berperan besar dalam menciptakan kemiskinan struktural (Calnitsky, 2018; Davis, 2014).

Amartya Sen (1981) menyatakan kemiskinan tidak hanya pada masalah kebutuhan dasar makanan tetapi juga kebutuhan lainnya terutama mengenai upaya meningkatkan kemampuan dan kesempatan yang sama bagi semua. Konsep ini dikembangkan oleh Brady, (2019) dalam ulasan *Theories of the causes of poverty* yang mengemukakan tiga determinan kemiskinan yakni : 1) Teori perilaku; Pendapatan dan budaya mempengaruhi perilaku yang menyebabkan



in kemiskinan membentuk pendapatan dan budaya. 2) Teori ekonomi dan Demografi mempengaruhi secara langsung teori keadilan s dengan menggunakan posisi asal (*original position*) dan selubung

ketidaktahuan (*veil of ignorance*) dimana *original position* merupakan pandangan bahwa terdapat situasi yang sama dan setara untuk setiap orang sehingga ada perlakuan yang seimbang, dan *veil of ignorance* merupakan pandangan bahwa setiap orang diperhadapkan dengan kondisi ketidaktahuannya akan fakta dirinya sehingga membutuhkan berkembangnya konsep keadilan terhadap perilaku dan kemiskinan, kemudian ekonomi dan demografi berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan melalui perilaku; 3). Teori politik; Kelembagaan dan kekuasaan mempengaruhi kebijakan, kelembagaan dan kebijakan mempengaruhi perubahan perilaku, Perilaku, kelembagaan dan kebijakan mempengaruhi kemiskinan (Rawls, 2008).

Lebih lanjut dalam teori perilaku Brady (2019) dikemukakan bahwa perilaku merupakan penyebab kemiskinan dimana terjadi karena kemalasan, fisik yang lemah, tidak merespon perubahan, kontraproduktif, tidak memiliki keterampilan, dan pendidikan yang rendah, dan kondisi ini susah dirubah karena merupakan karakter. Kemiskinan oleh perilaku individu tersebut terkadang dipicu oleh lingkungan, sumber daya yang tidak mendukung dan perkembangan teknologi yang rendah, termasuk disparitas ras. Sedangkan dalam teori struktural penyebab kemiskinan adalah kekuasaan dan sumber daya yang terkonsentrasi pada pihak tertentu hal ini menyebabkan pemerintah berperan memperlebar ketimpangan, dan teori politik mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah sangat dipengaruhi oleh institusi yang memiliki kekuatan untuk memobilisasi suara-suara yang dapat menyeimbangkan suara politisi yang selalu berpihak kepada para elit dan bisnis.

Atkinson (2015) mengemukakan bahwa ketimpangan ekonomi bukanlah



yang tak terhindarkan dari suatu kemajuan melainkan hasil dari institusi sebuah negara, pemerintah memiliki peran sentral dalam ketimpangan tersebut melalui perpajakan, perlindungan sosial,

pendidikan dan kebijakan pasar tenaga kerja. Ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi berhubungan tidak linier dan tidak terlepas dari pembangunan suatu negara, dimana pada negara miskin ketimpangan pendapatan berhubungan negatif sebaliknya di negara kaya dapat berhubungan positif, dan faktor lain yang sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pendidikan, stabilitas hukum dan kebijakan fiskal, serta sistem perpajakan dan pengeluaran pemerintah (Barro, 2008).

Perdebatan tersebut mendorong pandangan dalam penelitian ini bahwa kemiskinan dapat direduksi dengan kolaborasi antar berbagai agen pembangunan dan tidak bertumpu pada salah satu pihak, sehingga peran pemerintah dari sisi berbagai pengeluaran pemerintah, dan pihak swasta dari sisi investasi serta peran individu yang disoroti dari sisi pendidikan dipandang dapat menekan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Adam Smith (1776) *An Inquiry into the nature causes of the wealth of nation* mengemukakan teori pertumbuhan yang berfokus pada mekanisme pasar dan spesialis tenaga kerja. dimana investasi terhadap mesin, peralatan infrastruktur adalah penggerak pertumbuhan ekonomi, pembagian kerja terutama spesialisasi akan menciptakan pekerja yang terampil dalam pekerjaan tertentu, kondisi tersebut jika ditunjang dengan pasar kompetitif yang mendorong inovasi, efisiensi dan alokasi sumber daya yang optimal dan Pertumbuhan penduduk yang linier dengan permintaan barang dan jasa akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Smith berpendapat bahwa pemupukan modal merupakan syarat mutlak



dan modal suatu bangsa meningkat jika modal perorangan ng berarti bahwa pendapatan mereka harus ditingkatkan, dan hal

ini terjadi jika tingkat upah naik melebihi tingkat kebutuhan hidup, dengan demikian maka diperlukannya peningkatan laju investasi neto.

Solow R.M (1956) *A Contribution to the Theory of Economic Growth* mengembangkan model pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan dua faktor utama, yaitu modal dan tenaga kerja, serta perubahan teknologi sebagai variabel eksternal. Model tersebut menjelaskan model pertumbuhan yang melibatkan dua faktor produksi utama: modal (K) dan tenaga kerja (L), yang masing-masing berkontribusi terhadap produksi barang dan jasa. Dalam model ini, Solow mengasumsikan adanya hasil produksi konstan terhadap skala dan pengembalian marginal yang menurun terhadap modal.

Selanjutnya di kemukakan pula bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, laju akumulasi modal harus disesuaikan dengan laju pertumbuhan tenaga kerja yang berkembang secara eksogen (di luar pengaruh kebijakan ekonomi). Proses ini berjalan dengan melalui penyesuaian antara tingkat tabungan, investasi, dan tenaga kerja. Teori Solow mengemukakan bahwa perubahan teknologi akan meningkatkan produktivitas. Teknologi yang berkembang seiring waktu dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi jika diintegrasikan dengan pertumbuhan modal dan tenaga kerja. Dalam analisis lebih lanjut, Solow juga membahas variabel-variabel eksternal seperti pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pengeluaran untuk pendidikan dan investasi yang dapat mempercepat atau memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Perspektif baru ditawarkan dalam teori pertumbuhan endogen, teori ini berpendapat bahwa kesejahteraan berkelanjutan dipengaruhi oleh proses internal



manusia, modal investasi dan inovasi dimana peningkatan erhubungan langsung dengan inovasi yang cepat dan investasi ar terhadap modal manusia. Teori ini mengemukakan pula bahwa

ekonomi berbasis pengetahuan sebagai efek investasi pada teknologi dan manusia akan menghasilkan keuntungan, sehingga kebijakan pemerintah harus merangsang pertumbuhan dengan peningkatan investasi modal terutama terkait infrastruktur dibidang pendidikan, kesehatan dan telekomunikasi dimana investasi swasta pada R&D merupakan kunci kemajuan teknologi (Romer, 2019).

Schumpeter (1942) dalam pembahasan tentang capitalism, sosialisme dan demokrasi, mengemukakan Inovasi dan dinamika kreatif. Teori Schumpeterian tersebut berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi didorong oleh *creative destruction* yakni proses inovasi yang menghancurkan struktur lama dan menciptakan struktur baru (teknologi, model bisnis, industri). Perusahaan yang inovatif menciptakan keuntungan monopolistik, mendorong investasi dan pertumbuhan. Schumpeter berpendapat bahwa kapitalisme, meskipun tampaknya berhasil, pada akhirnya akan runtuh karena keberhasilannya sendiri. Schumpeter menegaskan bahwa teori *creative destruction* di mana inovasi dan kemajuan teknologi mengubah struktur ekonomi secara mendalam, dan kapitalisme tidak dapat bertahan dalam bentuknya yang ada.

Oded Galor (2011) mengemukakan *Teori Unified Growth* yang mencoba menggabungkan seluruh fase pertumbuhan dari masa pra modern hingga modern. Menjelaskan transisi dari stagnasi Malthusian ke percepatan pertumbuhan selanjutnya ke pertumbuhan stabil berbasis teknologi dan pendidikan. Galor mengusulkan bahwa transisi dari stagnasi menuju pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kemajuan teknologi, perubahan demografis, dan akumulasi modal manusia. Peralihan ini tidak hanya



a maju tetapi juga terlihat di negara-negara berkembang, meskipun yang berbeda. Dikemukakan lebih lanjut bahwa setelah transisi itu penurunan tingkat kelahiran, ekonomi mulai mengalami

pertumbuhan berkelanjutan. Selama tahap ini pertumbuhan pendapatan per kapita tidak lagi terhambat oleh pertumbuhan populasi yang pesat, dan kemajuan teknologi serta akumulasi modal manusia mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Ravallion (2004) mengulas tentang *pro-poor growth* yang mengungkapkan bahwa instrumen yang mampu melawan kemiskinan adalah pertumbuhan yang disertai dengan penurunan ketimpangan. Suatu proses pertumbuhan dikatakan netral distribusi jika pendapatan pada semua persentil tumbuh pada tingkat yang sama, sehingga perubahan distribusi dikatakan pro masyarakat miskin apabila komponen redistribusinya dapat mengurangi kemiskinan, dan hal ini dapat dilihat dari perubahan ketimpangan selama proses pertumbuhan, jika ketimpangan pendapatan tidak berubah seiring dengan pertumbuhan maka terdapat peningkatan besar dalam ketimpangan pendapatan absolut. Pemerintah berperan penting dalam memastikan pertumbuhan yang lebih pro masyarakat miskin, dimana dibutuhkannya tindakan nyata dalam mendorong peningkatan kualitas masyarakat miskin, namun terkadang terdapat bias dalam kebijakan perpajakan, pengeluaran dan migrasi ke wilayah yang lebih makmur.

Hirschman (1959) mengemukakan teori *trickle down effect* bahwa pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah pertumbuhan, kemudian akan menciptakan rembesan manfaat terhadap wilayah di sekitar pusat pertumbuhan atau wilayah pinggiran tersebut melalui penciptaan lapangan kerja dan peluang ekonomi lainnya sehingga terciptanya keseimbangan regional disisi lain pertumbuhan ekonomi pada wilayah pusat tersebut dapat juga memberi efek

di dampak negatif dimana daerah miskin akan semakin tertinggal pertumbuhan justru menarik berbagai sumber daya yang ada.



2.1.3 Ketimpangan pendapatan

Simon Kuznets (1955) "*Economic Growth and Income Inequality*" mengemukakan bahwa ketimpangan pendapatan cenderung meningkat, namun seiring waktu ketika pertumbuhan ekonomi berkelanjutan maka ketimpangan bergerak menyempit, kondisi ini terjadi karena adanya peningkatan produktivitas, peran pemerintah dalam redistribusi pendapatan melalui pajak progresif dan bantuan sosial, serta perubahan dalam struktur pasar tenaga kerja. Disisi lain konsentrasi tabungan yang sangat tinggi di kalangan kelompok pendapatan atas dimana yang berpenghasilan tinggi cenderung menyimpan lebih banyak yang mengarah pada pengumpulan aset yang lebih besar pada sedikit orang. hal ini memperburuk ketimpangan pendapatan.

Pemerintah memainkan peran penting dalam mengurangi ketimpangan baik dari sisi fiskal maupun intervensi lainnya yang mendukung kelompok berpendapat rendah, Kuznets menekankan kebijakan-kebijakan ini lebih berkembang di negara-negara maju dan meskipun ketimpangan pendapatan di negara berkembang lebih tinggi, pada umumnya kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti struktur ekonomi yang lebih primitif dan intervensi politik yang kurang memadai. Kuznet kemudian berargumen bahwa kompleksitas hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan akan memiliki tren yang berbeda-beda di setiap negara dan ini tergantung pada tahap perkembangan ekonomi dan kebijakan sosial yang dilakukan.

The Communist Manifesto Karl Marx & Friedrich Engels (1830) menggambarkan perbedaan antara kaum *bourgeoisie* (kelas kapitalis) dan kaum *proletariat* (kelas pekerja). Kaum *bourgeoisie* berperan merombak struktur sosial memperkenalkan produksi industri dan pasar, namun sistem ini berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan konflik antar kelas yang semakin tajam, disisi



lain kaum *proletariat* yang dieksploitasi oleh kaum *bourgeoisie* akan berkembang seiring dengan kemajuan industri, pertambahan jumlah kaum *proletariat* akan menjadi kelas yang terorganisir yang akan menentang kapitalis yang pada akhirnya menciptakan masyarakat tanpa kelas, dimana setiap orang akan memiliki akses yang sama terhadap kekayaan dan peluang. Karl Marx dan Friedrich Engels menegaskan bahwa untuk mencapai kondisi tersebut maka diperlukannya pemusatan kekayaan dan alat produksi ke tangan negara serta penyediaan layanan dan kebutuhan dasar yang setara bagi seluruh warga negara.

Capital in the Twenty-First Century (Piketty, 2014) menyoroti bahwa ketimpangan kekayaan dan pendapatan tidak hanya merupakan hasil dari mekanisme ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, sosial, keyakinan kolektif tentang keadilan dan pemerataan. Ketimpangan besar dalam distribusi kekayaan yang bersifat terus-menerus, dipengaruhi oleh tingkat pengembalian modal (r) dan tingkat pertumbuhan ekonomi (g) dan kondisi ini jika dibiarkan tanpa regulasi yang memadai akan memperburuk ketimpangan. Piketty menegaskan bahwa tidak ada mekanisme alami yang mengurangi ketimpangan. Perubahan sangat bergantung pada kebijakan institusional, seperti pajak progresif, pendidikan dan akses sumberdaya, dikatakan pula bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemajuan yang berkelanjutan memerlukan kebijakan dan tindakan yang melibatkan redistribusi kekayaan serta reformasi institusional.

Teori Human Capital Becker (1964) memaparkan berbagai jenis investasi dalam modal manusia yakni pendidikan formal, pelatihan di tempat kerja dan



ehatan yang berdampak pada peningkatan kemampuan individu itas ekonomi. Becker berpendapat bahwa investasi dalam ak hanya meningkatkan pendapatan seseorang melainkan juga

mempengaruhi distribusi pendapatan. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Dikemukakan pula bahwa faktor-faktor lain yang mempengaruhi akumulasi modal manusia adalah latar belakang keluarga dan akses terhadap peluang pendidikan. Perbedaan investasi terhadap modal manusia antar individu atau kelompok sosial dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam pendapatan dan peluang, selain itu pendidikan dan pelatihan haruslah dipandang sebagai investasi yang rasional dimana individu mempertimbangkan biaya dan manfaat jangka panjangnya.

Sen (1999) berargumen bahwa parameter pembangunan bukan hanya terletak pada pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan kemajuan teknologi melainkan juga pada kemampuan individu, sehingga pembangunan semestinya memperluas kebebasan substantif yang dimiliki individu yakni, kebebasan politik, peluang ekonomi, hak sosial (kebebasan mengakses pendidikan dan perawatan kesehatan), serta kebebasan untuk berpartisipasi dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Sen memperkenalkan pendekatan kemampuan yang mengukur pembangunan berdasarkan peluang nyata yang dimiliki seseorang untuk mencapai kesejahteraan.

Sen mendefinisikan kemiskinan bukan sebagai pendapatan yang rendah melainkan merupakan ketidakmampuan untuk mencapai pendidikan dan kesehatan yang baik, serta ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial, dan kondisi ini akan sangat rentan pada wilayah-wilayah dengan ketimpangan pendapatan yang tinggi, dengan demikian maka dibutuhkan pendekatan pembangunan yang lebih holistik dan berpusat pada



ondisi ini tercipta dari institusional yang memungkinkan kebebasan
ambang, dimana pemerintah harus lebih responsif terhadap
utuhan masyarakat terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan.

2.1.4 Desentralisasi Fiskal

Sebagaimana dikemukakan dalam kajian tentang kemiskinan maka kemiskinan menjadi permasalahan yang membutuhkan campur tangan pemerintah. Gambaran hubungan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan melekat pada fungsi pemerintah. Samuelson & Nordhaus (2009) ketika membahas tentang federalism fiskal mengemukakan 3 instrumen utama pemerintah yang berdampak pada pembangunan yakni perpajakan, pembelanjaan dan regulasi, selanjutnya dikemukakan fungsi dan perbedaan antara belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau lokal dimana belanja pemerintah lokal dititikberatkan pada penyediaan barang publik setempat sebagai respon dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan setempat.

Mankiw (2006) mengemukakan bagaimana belanja pemerintah mempengaruhi struktur ekonomi setempat dalam model perpotongan Keynesian dimana Pengeluaran Aktual (Y) sama dengan pengeluaran yang direncanakan (E) dan pengeluaran yang direncanakan merupakan fungsi pendapatan (Y), tingkat investasi yang direncanakan $\bar{I}$, serta variabel kebijakan fiskal $\bar{G}$ dan $\bar{T}$ yang dimodelkan dengan persamaan $E = C(Y - \bar{T}) + \bar{I} + \bar{G}$. Lebih lanjut Mankiw mengemukakan bahwa belanja pemerintah akan meningkatkan pendapatan dan kemudian meningkatkan konsumsi yang berdampak pada direduksinya persoalan yang menghambat pembangunan.

Oates (1972) mengemukakan ide teorema Desentralisasi (*The Decentralization Theorem*) yang mengacu pada dua asumsi yaitu : 1). bahwa publik yang dihasilkan mampu memaksimalkan kesejahteraan a masing-masing daerah: 2). Bahwa sentralisasi menghasilkan dengan tingkat yang sama pada semua wilayah. Lebih lanjut



dikemukakan pula bahwa desentralisasi fiskal merupakan solusi dalam meningkatkan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat. Pandangan ini tercermin dalam undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana APBN dan APBD baik dalam bentuk dana transfer, pendapatan asli daerah, dan pendapatan lainnya yang sah sebagai sumber pendapatan untuk mendanai belanja daerah guna memenuhi kebutuhan pelayanan publik sesuai kebutuhan daerah setempat. Kebijakan fiskal ini diharapkan menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan pada daerah termasuk kemiskinan.

Peran pemerintah sebagaimana teori keynesian tersebut dipandang sangat penting dimana belanja pemerintah ini akan menstabilkan ekonomi dan memberi efek multiplier (Blinder, 2008), dan semakin tinggi desentralisasi dengan Otonomi dan kewenangan, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang semakin tinggi, maka tingkat ketimpangan wilayah akan semakin menurun (Paddu, 2017), namun kebijakan fiskal tersebut tidak akan selalu sesuai harapan dikarenakan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan tekanan kelompok-kelompok berkepentingan lainnya, dan kondisi ini diungkapkan oleh teori *public choice* dimana belanja pemerintah pada akhirnya akan menimbulkan masalah inefisiensi dan pemborosan (Boyne, 1998).

Khan (2000) membahas konsep *rent-seeking* dalam kebijakan publik dimana praktek *rent-seeking* yakni kepentingan untuk memperoleh keuntungan tanpa menciptakan kekayaan baru atau berkontribusi pada kegiatan produktif yang



Lobi atau kontribusi politik) dan illegal (suap dan korupsi). Rent pembangunan dapat berefek negatif dan positif dan sangat a jenis rantainya. Apabila berfungsi mendorong pembelajaran atau

inovasi maka akan meningkatkan pertumbuhan, sebaliknya jika bersifat monopoli dan keuntungan pribadi maka dapat mengurangi efisiensi. Khan mengungkapkan bahwa proses *rent-seeking* di beberapa negara memajukan industrialisasi sementara di negara lainnya menciptakan ketidak efisiensi dimana terjadi penggunaan dana publik yang tidak tepat sasaran, misalnya subsidi atau bantuan sosial yang tidak tepat sasaran hingga pada penyelewengan dana publik. Selain itu pula maka desentralisasi fiskal tanpa kerangka kerja yang jelas dan bertanggung jawab akan menciptakan perilaku rente dan konservasi lingkungan yang lemah (Paddu et al., 2024).

Samuelson & Nordhaus (2009) mengemukakan bahwa dalam federalisme fiskal, program-program pada setiap tingkatan pemerintahan berbeda dan tentu saja memiliki eksternalitas yang berbeda-beda sehingga hal ini terletak dari bagaimana pemerintah mengambil berbagai keputusan, dan pengambilan keputusan ini adalah analisis dari teori pilihan publik yang sama persis dengan teori penawaran dan permintaan yang membahas berbagai pilihan pada sektor swasta. Lebih lanjut Samuelson & Nordhaus membahas tentang kemiskinan dari sisi pemerataan dan efisiensi, dimana salah satu cara mereduksi kemiskinan adalah dengan pemerataan pendapatan dimana program-program pertumbuhan ekonomi yang menciptakan pemerataan pendapatan perlu dilakukan namun apabila program untuk mendorong kondisi ini dari sisi pemajakan progresif dan tunjangan kesejahteraan akan merusak motivasi bekerja dan menabung. Program penanggulangan kemiskinan seperti tunjangan kesejahteraan, kupon pangan, bantuan kesehatan, menimbulkan penurunan manfaat yang tinggi, sehingga itu sendiri kemiskinan adalah bagaimana mendorong keluarga miskin yang rendah memiliki motivasi besar untuk bekerja.

Musgrave (1960) mengatakan bahwa pembangunan dalam



prosesnya, pemerintah akan beralih peran dari penyedia prasarana ke pengeluaran terkait program sosial guna mencapai kesejahteraan masyarakat. (Peacock & Wiseman, 1961) dalam teori Peacock & Wiseman menyetujui akan pengeluaran pemerintah tersebut namun guna memperbesar pengeluaran, pemerintah akan memperbesar pajak dan hal ini bertentangan dengan masyarakat, yang pada umumnya tidak suka membayar pajak, sehingga dalam kondisi normal terjadi pertumbuhan ekonomi dimana penerimaan pemerintah semakin meningkat yang berarti pengeluaran pemerintah semakin besar, tetapi kondisi ini akan menurunkan pengeluaran investasi dan konsumsi masyarakat.

Desentralisasi fiskal jika didukung oleh institusi yang akuntabel dan pengawasan memadai akan memperkuat kualitas tata kelola, namun tidak ada jaminan desentralisasi menghasilkan efisiensi atau pemerintahan yang baik dimana efektivitas tersebut sangat bergantung kepada desain kelembagaan, kapasitas administrasi daerah dan hubungan antar pemerintah pusat dan daerah, dan kuncinya terletak pada komitmen terhadap transparansi dan tanggung jawab publik (Sen, 1999). Bahl, R. W., & Linn (2002) mengatakan bahwa desentralisasi fiskal tidak optimal dikarenakan ketidaksesuaian antara tanggung jawab fiskal dan kapasitas fiskal pemerintah lokal, dan apabila terdapat inefisiensi dalam belanja publik maka pastilah anggaran tidak diarahkan secara efisien untuk manfaat sosial dan ekonomi, selain itu ada ketergantungan terhadap transfer pusat yang seringkali tidak memadai dan konsisten

Argumen teoritis untuk desentralisasi fiskal mengemukakan bahwa setiap pelayanan publik harus disediakan oleh yurisdiksi yang memiliki kontrol atas afis minimum yang akan menginternalisasi manfaat dan biaya sebut." Dimana sistem terdesentralisasi secara fiskal mengizinkan daerah berbeda sebagai cerminan preferensi penduduk mereka.



Sehingga sistem terdesentralisasi tersebut berfokus pada empat bidang, yang disebut sebagai pilar yakni : 1). Penugasan pengeluaran: penugasan kekuatan pengeluaran, fungsi, dan tanggung jawab pemberian layanan di berbagai tingkat pemerintahan. 2). Penugasan pendapatan: penugasan kekuatan pendapatan dan pembagian tanggung jawab di seluruh administrasi pendapatan. 3). Transfer fiskal antar pemerintah. 2). Pinjaman pemerintah daerah, utang dan aturan pembiayaan modal, tanggung jawab, dan akuntabilitas (Decentralization.Net, 2025).

Konsep terdesentralisasi yang telah lama menjadi konsumsi negara-negara maju tersebut mulai diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat peran tersebut dimana undang-undang tersebut menyoroti sisi pendapatan, belanja, pemerataan dan sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Secara substansi terdapat 4 pilar desentralisasi fiskal berdasarkan undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut yakni : 1) Mengurangi Ketimpangan Vertikal dan Horizontal: Pilar ini bertujuan untuk menyamakan kesempatan masyarakat dalam memperoleh layanan publik dan mencapai kesejahteraan, baik antara berbagai tingkatan pemerintahan (vertikal) maupun antar daerah (horizontal); 2). Memperkuat *Local Taxing Power*: Pilar ini fokus pada penguatan kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak dan retribusi, dengan tetap menjaga stabilitas dan perkembangan perekonomian daerah; 3). Meningkatkan Kualitas Belanja Daerah: Pilar ini menekankan pada peningkatan kualitas dan efektivitas belanja daerah



sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memacu daerah; 4) Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah: Pilar ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan belanja antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah agar terjadi sinergi yang lebih baik dalam pelaksanaan program-program pembangunan nasional dan daerah (Deslina, 2024).

Pada akhirnya pro dan kontra peran pemerintah dari sisi pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan yang diperdebatkan oleh pendukung teori neo-liberal dan pendukung teori Sosial-Demokrat memiliki kemungkinan atau peluang yang sama karena peran tersebut akan memberi efek yang berbeda antar wilayah, pengaruh yang berbeda ini lebih lanjut ditampilkan dalam berbagai temuan empiris terkait hal tersebut. Jika mengacu pada konsep 4 pilar yang berlaku di Indonesia maka penelitian ini menyoroti 3 pilar yang diangkat sangat krusial yakni : 1). Dana transfer sebagai upaya mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal; 2). Belanja daerah untuk melihat kualitas belanja dan 3). Derajat desentralisasi fiskal yang merupakan rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan untuk melihat *Local Taxing Power*

2.1.5 Pendidikan

Manusia sebagai kunci pembangunan dikemukakan Smith (1776) dalam pembagian kerja sebagai titik permulaan teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakannya, dimana peningkatan daya produktivitas tenaga kerja yang dihubungkan dengan peningkatan keterampilan pekerja. Pandangan ini terus berkembang hingga Schultz (1960) menyatakan bahwa Investasi SDM ada tiga jenis yakni : Migrasi, pendidikan dan Kesehatan. Pandangan ini didukung oleh Becker (1975) dalam pernyataannya bahwa bagian penting dalam investasi manusia adalah pendidikan, pelatihan dan kesehatan, peningkatan kapasitas tersebut akan menghasilkan peningkatan pendapatan seseorang, selanjutnya



mengatakan bahwa investasi tersebut juga berperan mendorong tenaga kerja untuk meningkatkan output dan pertumbuhan ekonomi. mengungkapkan bahwa rendahnya pendidikan menyebabkan

kemiskinan (Brady, 2019).

Todaro & Smith (2011) menjelaskan model Harrod-Domar $Y=AK$ yakni : A mewakili faktor yang mempengaruhi teknologi dan K merupakan modal fisik dan modal manusia dengan hasil yang tidak semakin menurun dimana hasil akhirnya adalah pertumbuhan yang berkelanjutan, sehingga pentingnya tabungan dan modal manusia untuk mencapai pertumbuhan, namun terjadi kebalikan dari asumsi umum pada sistem pendidikan pada wilayah berkembang yang justru memperbesar ketimpangan pendapatan, akibat buruk pendidikan formal terhadap ketimpangan adalah adanya korelasi positif antara pendidikan dan tingkat pendapatan selama hidup. Ketika tingkat pendapatan yang diperoleh tergantung pada lama sekolah maka ketimpangan pendapatan akan semakin diperkuat apabila kelompok-kelompok masyarakat yang mengenyam pendidikan tidak terwakili secara proporsional, atau dengan kata lain bahwa ketika orang miskin tidak memanfaatkan kesempatan untuk berada pada jenjang pendidikan tinggi karena alasan keuangan dan lain-lain maka pendidikan sedang memperbesar ketimpangan baik suatu generasi maupun antargenerasi.

Selanjutnya dikemukakan pula bahwa pendidikan dapat menyebabkan daerah miskin akan semakin miskin dan kaya akan semakin kaya dan hal ini terjadi karena migrasi di kalangan pekerja berpendidikan tinggi atau yang disebut pengurasan intelektual (*brain drain*). Barro (2008) mengatakan bahwa pendidikan terutama pendidikan menengah dan pendidikan tinggi menjadi variabel yang dapat memoderasi ketimpangan terhadap pertumbuhan ekonomi, ketimpangan yang tinggi berpotensi menghambat akumulasi modal manusia dan mengganggu



jangka panjang. Philippe Aghion (1998) mengatakan bahwa ekonomi, ketimpangan pendapatan dan globalisasi berkaitan erat, tidak selalu menjadi penghalang bagi pertumbuhan namun

ketimpangan yang tinggi dan tidak terkendali menjadi pemicu instabilitas sosial, merusak kohesi sosial dan memperlambat proses pembangunan jangka panjang, Institusi yang inklusif, pasar tenaga kerja yang fleksibel dan sistem pendidikan yang merata menjadi kunci memaksimalkan pertumbuhan dengan menekan ketimpangan.

Ulasan-ulasan ini mengindikasikan bahwa pendidikan meskipun diasumsikan memiliki efek positif terhadap pertumbuhan dan efek negatif terhadap ketimpangan dan kemiskinan namun dalam kondisi tertentu maka akan terjadi penyimpangan asumsi sehingga terjadi perubahan arah parameter pendidikan terhadap kemiskinan baik langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Arah parameter yang berbeda ini dapat dilihat lebih lanjut dalam kajian empiris pengaruh pendidikan.

2.1.6 Investasi

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang menyebabkan ketidakmampuan sehingga membutuhkan bantuan orang lain, khususnya penciptaan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi (Chambers, 1983). Wilayah miskin pada umumnya dalam siklus investasi rendah, modal rendah, produktivitas rendah, pendapatan rendah dan permintaan rendah yang terbentuk menjadi lingkaran setan kemiskinan (Nurkse, 1956). Berbagai teori pertumbuhan menempatkan modal, baik modal fisik maupun modal Manusia sebagai motor penggerak aktivitas pembangunan dimana mobilisasinya akan mendorong percepatan pembangunan (Romer, 2019).

Dalam Model Pembangunan Rostow dan Musgrave dikemukakan bahwa peran pemerintah dan tahapan pembangunan memiliki hubungan yang erat. Peran pemerintah berdasarkan tahap awal, menengah dan lanjut dimana dalam tahap awal investasi swasta akan bertambah besar sedangkan



investasi pemerintah terhadap GDP akan semakin kecil (Colm & Musgrave, 1960)

Domar (1957) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi membutuhkan keseimbangan kapasitas produksi dan permintaan agregat, sehingga jika investasi hanya meningkatkan produksi tanpa menciptakan permintaan yang setara maka akan ada kelebihan kapasitas dan stagnasi ekonomi. Pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan membutuhkan Investasi yang tinggi dan efisien dan hal ini harus didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang mendorong permintaan agregat.

Harrod (1948) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bersifat otomatis dan stabil melainkan rapuh dan rentan terhadap ketidakseimbangan sehingga Investasi dan ekspektasi pelaku ekonomi memainkan peran sentral dalam menentukan arah pertumbuhan tersebut. Harrod-Domar investasi sebagai kunci pertumbuhan, dimana dari sisi permintaan investasi akan menciptakan pendapatan dan dari sisi penawaran investasi memperbesar kapasitas produksi, namun lebih lanjut dikemukakan bahwa untuk wilayah-wilayah miskin maka diperlukannya perubahan faktor sosial dan kelembagaan karena akan menyebabkan melambatnya laju pertumbuhan dan timbulnya pengangguran

Haughthon & Khandkse (2009) menyatakan bahwa investasi publik dan swasta memiliki peran penting dalam kemiskinan, Investasi pada infrastruktur, pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja dan memperbaiki akses kelompok miskin terhadap pelayanan dasar. Jeffrey D. Sachs, (1972) mengatakan penanganan permasalahan di daerah-daerah miskin tidak seharusnya hanya pada bantuan-bantuan sosial melainkan pada Investasi berkelanjutan dimana investasi tersebut harus dilakukan pada



asar yang langsung memberi kelayakan hidup kepada masyarakat air bersih, pendidikan, kesehatan, dan energi, namun demikian si aktif masyarakat maka, investasi tersebut tidak akan memberi

efek perubahan atas kondisi kemiskinan yang dialaminya.

Menurut Teori struktural yang dikemukakan Brady (2019), pengembangan ekonomi dibutuhkan untuk menekan kemiskinan dimana investasi ekonomi terkait pembangunan infrastruktur, kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan akan menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik yang pada akhirnya berefek pada penurunan kemiskinan, selain investasi tersebut diperlukan pula investasi pada sektor-sektor sosial dalam hal ini terkait dengan program-program kesejahteraan kepada masyarakat miskin, investasi tersebut pada akhirnya akan mendorong pendapatan sehingga mempersempit ketimpangan pendapatan yang pada akhirnya akan berfungsi sebagai jaring pengaman sehingga masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan yang menjeratnya.

Ulasan investasi ini menekankan bahwa investasi meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan yang pada akhirnya akan menekan kemiskinan namun kondisi yang berbeda dapat saja memberi arah parameter yang menyimpang antara investasi, pertumbuhan, pendapatan dan kemiskinan, selanjutnya berbagai kondisi ini ditunjukkan dalam kajian empiris terkait pengaruh Investasi

2.2. Tinjauan Empiris

Mengacu dari teori yang telah dikemukakan maka kajian-kajian empiris berikut disajikan guna melihat hubungan antara variabel eksogen dan endogen yang dikemukakan dalam penelitian ini. Kajian tersebut juga tersaji pada tabel empiris (Lampiran 14)



2.2.1. Daerah dan Kemiskinan

innah *et al* (2022) dengan model regresi data panel pada 34
donesia, periode 2015-2020 mengemukakan bahwa belanja

pemerintah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan secara langsung, dan meskipun berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, sehingga pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan secara tidak langsung jika melalui pertumbuhan ekonomi. Arah parameter negatif antara belanja daerah dan kemiskinan tersebut didukung oleh temuan (Ajisafe *et al.*, 2024).

Belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi searah dengan (Asfar *et al.*, 2022; Mustamin *et al.*, 2015). Dan temuan lain mengatakan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi (Krisma Jaya & Dewi, 2019), dan temuan Vitara Agatha & Uliansyah, (2021) mengatakan berpengaruh negatif.

Pandangan berbeda dikemukakan oleh Usmanova (2023) dimana pada penggunaan metode Neutrosophic-AHP dengan model ARDL dan VAR meneliti kemiskinan di Uzbekistan selama periode 2000-2021, ditemukan bahwa belanja pemerintah terhadap kemiskinan akan berdampak negatif pada tahun pertama dan positif setelah tahun berikutnya, dan pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan setelah tahun berikutnya. Pandangan searah dikemukakan juga oleh Anderson *et al* (2018) yang melakukan penelitian pada negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah menurut Bank Dunia, dimana ditemukan bahwa belum ada bukti yang jelas tentang belanja pemerintah yang tinggi dapat mengurangi kemiskinan di negara-negara berpenghasilan



menengah, selain itu temuannya juga mengatakan bahwa hubungan pemerintah terhadap kemiskinan rata-rata kurang negatif untuk Sub-Sahara dan lebih negatif untuk negara di Eropa timur dan Asia

Tengah.

Belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dikemukakan (Fitriyanti & Handayani, 2021; Krismajaya & Dewi, 2019; Nenbee *et al.*, 2021; Setena, 2024; Vitara Agatha & Uliansyah, 2021). Belanja daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Ajisafe *et al.*, 2024; Laodini *et al.*, 2023). Belanja daerah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan (Ajisafe *et al.*, 2024). Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap kemiskinan (Setena, 2024).

Hubungan belanja daerah, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan dikemukakan pula oleh Sabir *et al* (2015) dalam penelitian di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan pada periode 2008-2014 mengatakan bahwa belanja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi berdampak negatif terhadap ketimpangan pendapatan, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat menekan ketimpangan pendapatan jika didorong oleh sektor-sektor yang lebih banyak menyerap tenaga kerja, misalnya sektor pertanian.

Pandangan searah tentang belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pandangan berbeda terkait belanja daerah dan ketimpangan pendapatan diungkapkan oleh Fattah *et al* (2022) pada penelitian di 24 kabupaten/kota Sulawesi Selatan periode 2014-2020 belanja langsung pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan secara langsung, dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, serta pertumbuhan



berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, sehingga belanja langsung Pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi.

2.2.2 Derajat desentralisasi fiskal (DDF) daerah dan Kemiskinan

Sudewi & Wirathi (2013) melakukan penelitian pada Kabupaten/kota di Provinsi Bali selama periode 2003-2011 ditemukan bahwa derajat desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Pandangan tersebut searah dengan temuan (Aulia, 2014) dengan menggunakan metode korelasi kanonikal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2003-2012, ditemukan bahwa DDF memiliki hubungan yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan kemiskinan. Pandangan hubungan negatif DDF dan kemiskinan didukung pula oleh temuan (Ali & Saleh, 2020; Pantas *et al.*, 2019; Wijaya, 2019; Zahari *et al.*, 2018).

Temuan Wibowo & Oktivalerina (2022) mengungkapkan bahwa pengaruh negatif tersebut hanya pada kabupaten/kota secara nasional dan Wilayah Barat Indonesia maupun daerah perkotaan namun untuk Wilayah Timur Indonesia tidak berpengaruh. Pandangan tidak berpengaruhnya DDF terhadap kemiskinan ini searah dengan temuan (Purnomo & Danuta, 2022; Situmorang *et al.*, 2023; Widyastuti & Nusantara, 2022) dan pandangan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan searah dengan temuan (Ali & Saleh, 2020). Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kemiskinan (Widyastuti & Nusantara, 2022). Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Pantas *et al.*, 2019; Wijaya, 2019).

DDF tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi (Astuti *et al.*, 2020; Pantas *et al.*, 2019; Wijaya, 2019). DDF berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Noviar *et al.*, 2023). DDF berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Hevi Novita Ramandani, 2024; Kusuma & Anwar, 2024; 2022). DDF berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan (Lorentino Togar Laut, 2021). DDF tidak berpengaruh terhadap



ketimpangan pendapatan (Rosa & Sovita, 2016). Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan (Anti Nur Izzati, Lorentino Togar Laut, 2021).

2.2.3 Pendidikan dan Kemiskinan

Litschig & Morrison (2013) mengadakan penelitian dengan populasi 8.500-18.700 jiwa dengan menggunakan analisis regresi di negara Brazil menemukan bahwa pendidikan berdampak pada pengentasan kemiskinan dimana masyarakat yang menerima tambahan dana dari pemerintah pusat mendapatkan manfaat dalam hasil pendidikan dan pada akhirnya ada pengurangan kemiskinan. Temuan ini searah dengan temuan Medeiros *et al* (2020) yang melakukan survey di 35 rumah tangga nasional di Negara Brasil menemukan bahwa skala pendidikan tinggi akan mengarah pada tingkat ketimpangan dan kemiskinan yang jauh lebih rendah. Arah parameter negatif pendidikan dan kemiskinan tersebut searah dengan temuan (Bintang & Woyanti, 2018; Dewi, 2021; Finkayana & Dewi, 2016; Hofmarcher, 2021; Izzati & Indrawati, 2021; Kevin *et al.*, 2022; Rauch *et al.*, 2022; Utami & Masjkuri, 2018; Winda Yanthi & Wenagama, 2022).

Temuan Purnomo *et al* (2020) juga menyetujui hubungan negatif tersebut selain itu pula dikatakan bahwa hubungan tersebut dapat dimediasi oleh pendapatan per kapita. Meskipun pendidikan diakui berperan mereduksi kemiskinan namun Barbosa *et al* (2020) dengan menggunakan data sensus dan survei Rumah Tangga Nasional Brasil membuat kajian terhadap pendidikan, ketimpangan dan kemiskinan, ditemukan bahwa dibutuhkannya waktu yang lebih lama barulah pendidikan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan



n hanya peningkatan pendidikan tinggi yang mampu menciptakan dan kemiskinan yang rendah.

uh negatif pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan tersebut

searah dengan temuan (Rauch *et al.*, 2022; Situngkir & Syafri, 2020; Winda Yanthi & Wenagama, 2022). Dalam temuan lain ketimpangan pendapatan dipandang berpengaruh positif terhadap kemiskinan (Dewi, 2021; Wandita & Fithriani, 2021), namun temuan lainnya mengungkapkan bahwa ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Izzati & Indrawati, 2021). Pendidikan tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan diungkapkan dalam temuan (Wandita & Fithriani, 2021)

Pandangan berbeda terkait pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dikemukakan oleh (Harman *et al.*, 2022) dengan menggunakan Path Analysis dan data time series pada periode 2006-2020 di Kabupaten Bone dimana Rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Tidak berpengaruhnya pendidikan terhadap kemiskinan tersebut searah dengan temuan (Wandita & Fithriani, 2021).

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap terhadap kemiskinan (Dewi, 2021). Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kemiskinan (Bintang & Woyanti, 2018; Izzati & Indrawati, 2021). Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Kevin *et al.*, 2022).

Samuel (2021) dengan menggunakan model Lag Terdistribusi Autoregresif dalam periode 2000-2016 di Nigeria menemukan bahwa pendidikan tidak memiliki dampak dalam jangka pendek sebaliknya dalam jangka panjang memiliki dampak sehingga disarankan agar belanja pemerintah untuk pendidikan lebih difokuskan. Pada kondisi lain pendidikan dapat memperparah kemiskinan hal ini dikemukakan oleh (Zhang, 2014) yang meneliti di 11 Provinsi barat China selama periode 2004



akan bahwa biaya pendidikan yang tinggi berpengaruh terhadap n distribusi pendapatan, keluarga dengan pendapatan rendah untuk berinvestasi dalam pendidikan anak-anak justru seringkali

terjebak dalam kemiskinan, dimana mereka berhutang banyak namun tidak mendapatkan pengembalian investasi yang diharapkan.

2.2.4 Investasi dan Kemiskinan

Mutamainnah *et al* (2022) dengan model regresi data panel pada 34 provinsi di Indonesia, periode 2015-2020 mengemukakan bahwa Investasi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan secara langsung, sedangkan Investasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, sehingga secara tidak langsung investasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan jika melalui pertumbuhan ekonomi. Dampak negatif investasi terhadap kemiskinan tersebut searah dengan temuan (Anetor *et al.*, 2020; Krismajaya & Dewi, 2019; S & Soegoto, 2022).

Aloui *et al* (2024) dalam penelitian di Negara Sub-Saharan African dengan periode 1996 – 2017 menemukan bahwa investasi berpengaruh negatif terhadap pengentasan kemiskinan di negara-negara Afrika Sub – Sahara, ECCAS, IGD dan SAD sebaliknya berpengaruh positif di ECOWAS. Pandangan positif ini searah dengan temuan (Marini, 2016). Dan temuan lain mengatakan bahwa investasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Kartini *et al.*, 2019; Mustamin *et al.*, 2015; N. R. N. S. Pratama & Utama, 2019; Semara *et al.*, 2021; Supratyoningsih & Yuliarmi, 2022)

Pandangan investasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi searah dengan temuan (Marini, 2016; Mustamin *et al.*, 2015; R. Pratama, Klindangen, *et al.*, 2019; Supratyoningsih & Yuliarmi, 2022). Pandangan berbeda yakni Investasi berpengaruh negatif terhadap

cara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dikemukakan (Krismajaya & Dewi, 2019; Semara *et al.*, 2021). Hubungan emiskinan tidak terlepas pada kondisi suatu wilayah, (Aloui *et al.*,



2024) mengemukakan dalam penelitiannya yang dilakukan di Negara-negara Afrika Sub–Suhara, Asia, Amerika Latin, dan Eropa Timur selama periode 1996 – 2017 menemukan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap pengurangan kemiskinan di Afrika Sub-Suhara dan Amerika Latin dan berpengaruh negatif di Eropa Timur, namun untuk Asia tidak berpengaruh. Pandangan tersebut searah dengan temuan Dhrifi *et al.*, (2020) yang melakukan penelitian dengan model empiris untuk tiga sub-panel kawasa: Asia, Afrika dan Amerika Latin dalam periode 1995 – 2017 menemukan bahwa ada pengaruh negatif antara investasi dan kemiskinan di negara Asia dan Amerika Latin sebaliknya tidak berpengaruh di Afrika.

Investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dikemukakan dalam temuan (Adipuryanti & Sudibia, 2015; Asfar *et al.*, 2022; Danawati *et al.*, 2016; N. R. N. S. Pratama & Utama, 2019; Ross & Fleming, 2022). Sebaliknya temuan Kartini *et al.*, (2019) mengatakan bahwa hubungan tersebut adalah negatif dan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Namun pada temuan lainnya dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kemiskinan (Asfar *et al.*, 2022; Marini, 2016). Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan (Adipuryanti & Sudibia, 2015). Investasi secara langsung tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan namun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif (Danawati *et al.*, 2016).

Pandangan berbeda antara investasi dan ketimpangan pendapatan



oleh (Fattah *et al.*, 2022; Miara & Yunani, 2020) ada penelitian di 24 kabupaten Sulawesi Selatan periode 2014-2020 investasi berpengaruh langsung terhadap ketimpangan pendapatan secara langsung, dan tidak

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga investasi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi.

Pada akhirnya pandangan pesimis terkait hubungan investasi dan kemiskinan dikemukakan oleh (Chukwu *et al.*, 2022) melakukan penelitian di Negara Afrika yang mencakup tahun 1990 -2019 menemukan bahwa investasi pada umumnya berorientasi pada keuntungan dan cenderung berfokus pada sektor-sektor yang menjanjikan pengembalian yang tinggi sehingga seringkali terkonsentrasi pada wilayah-wilayah dengan daya beli tinggi berkaitan erat dengan teknologi serta sektor manufaktur. Pandangan pesimis juga dikemukakan oleh (Musakwa & Odhiambo, 2020) yang melakukan penelitian di Tanzania dalam periode 1980 – 2014 dimana investasi akan mengurangi kemiskinan hanya dalam jangka pendek tetapi kemiskinan akan menekan investasi dalam jangka panjang.

Beberapa kajian empiris juga menyoroti sektor-sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Sektor tersier dipandang sebagai kontributor positif terhadap pertumbuhan, tetapi juga kontributor terbesar terhadap peningkatan ketimpangan, sementara sektor primer, meskipun tumbuh lambat telah menekan lajunya ketimpangan (Sahoo & Paltasingh, 2019). Selain itu maka ada temuan mengungkapkan bahwa investasi yang berfokus pada sektor primer dan sekunder seperti proyek methane, hidro, dan biomassa lebih efektif dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan dibandingkan proyek di sektor tersier (Grover & Rao, 2020) .

